

Pedoman Penilaian **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN** **KAWASAN KONSERVASI** **DI INDONESIA**

Management Effectiveness Tracking Tool





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
2015



PEDOMAN PENILAIAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

*MANAGEMENT EFFECTIVENESS
TRACKING TOOL*



Diterbitkan oleh

Direktorat Kawasan Konservasi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kontributor:

Adi Widiyanto (Burung Indonesia), Agus Budi Sutito (UNDP), Abidah (LESTARI), Agus Yasin (Direktorat KK), Anwar Purwoto (WWF), Beny A. Noor (WWF – ID), David P (CI-Indonesia), Deni Purwandana (Komodo Sp), Dewi Sulastriningsih (Direktorat KK), Edina Ginting (BBKSDA Sumatera Utara), Erwin Wilianto (Forum Harimau Kita), Fitty Machmudah (Direktorat KKH), Hart Lamers S (TN Laiwangi Wanggameti), Hartono (Direktorat KK), Iqbal Abadi Rasjid (Direktorat KK), Iskandar (Setditjen KSDAE), Ismet Khaeruddin (Forclime), Jusman (BTN Takabonerate), Lili Sadiikin (ZSL), Listya Kusumawardhani (Direktorat PIKA), M. G. Nababan (BBKSDA Papua), M. Muslich (WCS), Munawar Kholis (WCS), N. Andayani (WCS), Nunu Anugrah (BKSDA Sumatera Selatan), Nurwanto (Direktorat PJLHK), Rahmad Saleh (BBTN Gunung Leuser), Retno Suratri (Setjen KLHK), Rudijanta Tjahja Nugraha (Direktorat KK), Sadtata N.A (TN Aketajawe Lolobata), Soewartono (Pemerhati Konservasi), Sondang S (BBTN Gunung Gede Pangrango), Sunandar (BBKSDA Jatim), Suswaji (Direktorat KK), Tamen Sitorus (BBKSDA NTT), Toto Indraswanto (TN Siberut), Wahyu Rudhianto (TN Kepulauan Seribu), Wenda Yandra Komara (Direktorat KK), William Marthy (WCS-IP), Wilson Novarino (Universitas Andalas), Yudi H (WCS), Zaini (BKSDA Kalimantan Tengah)

Copyright photo:

photo cover ©Bisro Syahbani | Komodo ©Kuswandono |

Surfing ©TN Alas Purwo | Menyelam ©BalaiTN Teluk Cendrawasih |

Pendakian Gunung ©Yohanes TN Lorentz | TN G Rinjani-NTB-lake7 ©Balai TN Gn Rinjani |

Jalak Bali ©Iskandar | Badak Sumatera ©Wulan Pusparini (WCS IP) |

TN Kelimutu ©Iskandar | Banteng ©Balai TN Ujung Kulon



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR: P. 15/KSDAE-SET/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2015-2019;
- b. bahwa guna mendukung tercapainya Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk kawasan terestrial maupun kawasan perairan, tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan panduan dalam melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia

Pasal 3

Menugaskan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah serta pihak terkait untuk mempedomani keputusan ini sebagai acuan dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2015
Direktur Jenderal



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP: 19560929 198202 1 001

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Indonesia merupakan salah satu hotspot keragaman hayati penting di dunia. Untuk melestarikan keragaman hayati tersebut Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya pelestarian sumberdaya alam untuk keperluan umat manusia.

Kondisi pelestarian keragaman hayati di dunia menghadapi tantangan yang berat. Laju kepunahan yang di era 80-an diketahui 1 spesies per hari, kemudian di tahun 2000-an ini telah meningkat pesat menjadi 100 jenis perhari. Tidak menutup kemungkinan laju tersebut akan semakin meningkat di kemudian hari.

Menjaga keberadaan jenis-jenis sumberdaya alam yang penting merupakan salah satu mandat dari pengelolaan kawasan konservasi yang ada. Untuk itu perlu senantiasa dilakukan pemantauan terhadap kondisi pengelolaan kawasan konservasi yang ada. Hal ini selain untuk memastikan bahwa kawasan dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, juga sebagai alat untuk memperbaiki kelemahan - kelemahan yang ada.

Upaya pemantauan terhadap kondisi pengelolaan kawasan konservasi telah dikembangkan oleh beberapa lembaga di dunia ini,

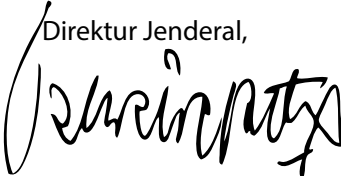
dengan mengacu pada pedoman pemantauan Efektivitas pengelolaan yang dikeluarkan oleh IUCN. Salah satu perangkat yang telah digunakan secara luas adalah *METT Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) yang dihasilkan oleh Bank Dunia dan WWF pada tahun 2007.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain pengalaman implementasi; sederhana; dan menghasilkan gambaran yang terukur, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempertimbangkan untuk menggunakan METT sebagai perangkat yang digunakan dalam memantau tingkat pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Namun demikian penggunaan METT dilakukan dengan beberapa penyesuaian yang didasari atas situasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Panduan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan ini diharapkan semua pihak yang mempunyai perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat menggunakan pedoman ini. Dengan keseragaman pedoman yang digunakan diharapkan dapat digunakan dalam melihat kondisi pengelolaan yang dilakukan secara menyeluruh di Indonesia.

Penggunaan panduan ini diharapkan menghasilkan masukan-masukkan yang akan digunakan dalam upaya perbaikan pengelolaan ke depan. Masukan-masukan ini nantinya perlu dituangkan dalam sejumlah rencana aksi yang nyata sehingga memudahkan proses penyusunan rencana untuk perbaikan dalam waktu ke depan.

Sebagai penutup kata, diharapkan pedoman ini menjadi salah satu cara memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang menjadi benteng terakhir pelestarian keragaman hayati Indonesia.

Direktur Jenderal,


Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc

UCAPAN TERIMA KASIH



Pedoman penilaian Efektivitas pengelolaan ini disusun berdasarkan dokumen *Management Effectiveness Tracking Tool* “Perangkat Peman-tauan Efektivitas Pengelolaan” Edisi kedua yang diterbitkan oleh WWF dan the World Bank dan “Perangkat untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan Efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi perairan”.

Namun demikian beberapa penjelasan terkait dengan kuisisioner pertanyaan telah diperbaiki dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman implementasi penilaian yang dilakukan di Indonesia. Tambahan-tambahan penjelasan juga diberikan untuk memperjelas pilihan-pilihan jawaban yang dimaksudkan semata-mata untuk mengurangi bias pemahaman dalam proses penilaian.

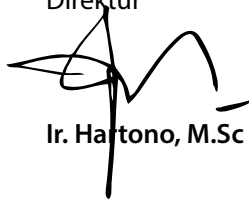
Dokumen ini diperlengkapi dengan prinsip-prinsip penilaian dan pedoman proses penilaian yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas penilaian yang dihasilkan. Sehingga hasil penilaian akan menjadi pijakan dalam menentukan langkah ke depan program-program perbaikan yang direncanakan.

Proses penyempurnaan dokumen ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan, diskusi dan workshop yang dilakukan mulai

Juli hingga November 2015. Keterlibatan dan dukungan para pihak menjadi salah satu poin penting dalam menghasilkan dokumen ini, dari mulai pengelola kawasan, lingkup Ditjen KSDAE dan para mitra yaitu WWF, WCS-IP, FFI, CI, ZSL, Forclime, Forum Harimau Kita, Burung Indonesia, Universitas Andalas dan proyek-proyek yang ada seperti E-PASS, LESTARI, GIZ Forclime.

Atas semua dukungan dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan panduan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi salah satu pendorong dalam perbaikan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia di masa mendatang.

Direktur

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Ir. Hartono, M.Sc

DAFTAR ISI



KONTRIBUTOR	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan	5
II. PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	7
A. Penilaian Kawasan Konservasi Terrestrial (METT).....	11
B. Penilaian Kawasan Konservasi Perairan	12
III. PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN.....	13
IV. PANDUAN PROSES PENILAIAN.....	19
A. Prakondisi	19
B. Proses Penilaian	21
C. Penyusunan Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	25

V. HASIL PENILAIAN.....	29
A. Penyusunan laporan	29
B. Penyampaian laporan dan pengelolaan informasi hasil penilaian	30
LAMPIRAN	31
Lampiran 1. Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi.....	33
Lampiran 2. Ancaman Kawasan Konservasi	35
Lampiran 3. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan	40
Lampiran 4. Scorecard Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	65
Lampiran 5. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan ...	93
Lampiran 6. Tabel Perhitungan Persentase Setiap Aspek Penilaian....	96
Lampiran 7. Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	98



I. PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Kawasan konservasi memiliki peran yang tidak tergantikan sebagai benteng perlindungan spesies dan bagi upaya konservasi keragaman hayati. Saat ini terdapat lebih dari 150.000 kawasan konservasi di dunia dengan luasan mencapai sekitar 19 juta km² atau 12,7% permukaan bumi.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah mengalokasikan tidak kurang 27 juta hektar sebagai wilayah perlindungan. Sebagian besar kawasan tersebut disediakan guna perlindungan keragaman hayati yang dimiliki. Adapun rincian 551 kawasan konservasi di Indonesia adalah:

1. Cagar Alam sebanyak 220 kawasan,
2. Suaka Margasatwa sebanyak 75 kawasan,
3. Taman Wisata Alam sebanyak 123 kawasan,
4. Taman Hutan Raya sebanyak 26 kawasan,
5. Taman Buru sebanyak 12 kawasan,
6. Taman Nasional sebanyak 51 kawasan dan
7. Kawasan yang masih berstatus KSA/ KPA sebanyak 46 kawasan

Fakta menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia tersebut. Hal

tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain adalah kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum *clear and clean*, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal. Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.

Permasalahan lain yang umum yang terjadi dalam pengelolaan adalah adanya kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan; kurangnya sumberdaya yang tersedia; ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki; serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Menyadari akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi dalam mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Indonesia bertekad kuat memperbaiki kualitas pengelolaan yang dilakukan. Peningkatan kualitas pengelolaan perlu dimonitor menggunakan perangkat yang sesuai. Hal ini juga sejalan dengan dokumen *Program of Work Convention on Biological Diversity* (PoW CBD) pada bagian kawasan konservasi khususnya pada poin 4.4 yang mengamanatkan untuk mengimplementasikan evaluasi efektivitas pengelolaan pada minimal 30% kawasan konservasi setiap anggota *Convention on Biological Diversity* (CBD).

Mempertimbangkan bahwa program peningkatan efektivitas pengelolaan menjadi program nasional pemerintah, maka perlu ditetapkan perangkat yang akan digunakan sebagai sistem monitoring. Sistem ini nantinya akan menjadi perangkat yang wajib digunakan dalam melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia oleh pihak-pihak terkait.

Management Effectiveness Tracking Tool (METT) yang dikembangkan oleh WWF dan Bank Dunia di tahun 2007 menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan monitoring. Namun demikian dengan mempertimbangkan pengalaman dalam

penggunaan selama ini di Indonesia, perangkat METT dirasakan perlu untuk dilengkapi dengan beberapa informasi yang diperlukan dalam penerapan di Indonesia. Selain itu mengingat METT lebih difokuskan untuk menilai kawasan konservasi daratan, sehingga dokumen penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan merujuk pada dokumen 'Perangkat penilaian untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi perairan' yang dipublikasikan oleh the World Bank tahun 2004

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penilaian Efektivitas pengelolaan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan baik itu kawasan konservasi daratan maupun perairan di Indonesia.

Tujuannya adalah agar hasil penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan mempunyai standar yang sama, dan layak untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan menjadi sistem monitoring pengelolaan kawasan konservasi.





II. PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



II.

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan.

Pada konvensi CBD ke-7 tahun 2004, sebanyak 188 negara anggota telah menyepakati program kerja yang diantaranya adalah membangun sistem penilaian dan pelaporan Efektivitas terhadap 30 persen kawasan konservasi yang ada di dunia.

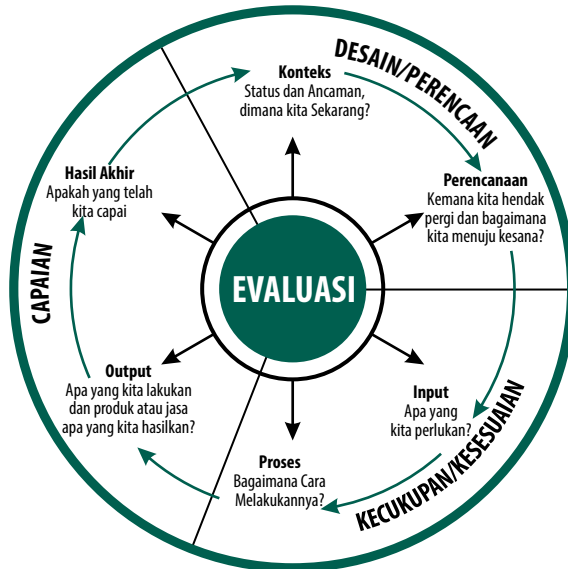
The International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menyediakan kerangka kerja penilaian efektivitas pengelolaan secara umum yang diharapkan menjadi panduan perangkat-perangkat penilaian yang dikembangkan di dunia.

Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 aspek utama, yaitu :

- 1) Pemahaman akan **konteks** dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat.

- 2) **perencanaan** terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
- 3) alokasi sumberdaya (**input**), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.
- 4) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (**proses**),
- 5) produk dan jasa (**output**) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan,
- 6) dampak atau **outcome** yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Rangkaian keenam elemen pengelolaan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan yang saling hubungannya tergambar dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka kerja penilaian efektivitas pengelolaan (IUCN, 2006)

A. PENILAIAN KAWASAN KONSERVASI TERRESTRIAL (METT)

METT merupakan salah satu perangkat yang secara universal telah digunakan lebih dari 100 negara pada ribuan kawasan konservasi. Perangkat ini pada awalnya dikembangkan oleh WWF dan GEF untuk memantau perkembangan proyek yang dijalankan.

Metode penilaian METT tetap mengikuti kerangka kerja umum penilaian yang diberikan oleh WCPA sebagai penduan umum penilaian Efektivitas di seluruh dunia. Dimana keenam elemen penilaian sesuai kerangka kerja WCPA dinilai dengan kriteria-kriteria yang diukur sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria-kriteria dari elemen penilaian yang dievaluasi

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Fokus dari evaluasi
Konteks	<i>Dimana kita sekarang?</i> Penilaian akan arti penting, ancaman dan iklim kebijakan	❖ <i>Arti penting</i> ❖ <i>Ancaman-ancaman</i> ❖ <i>Kerawanan</i> ❖ <i>Konteks nasional</i> ❖ <i>Mitra</i>	Status
Perencanaan	<i>Kemana kita hendak pergi?</i> Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan konservasi	❖ <i>Peraturan dan kebijakan kawasan konservasi</i> ❖ <i>Desain dari sistem kawasan konservasi</i> ❖ <i>Desain dari kawasan konservasi</i> ❖ <i>Perencanaan pengelolaan</i>	Kesesuaian
Input	<i>Apa yang kita perlukan?</i> Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	❖ <i>Pengadaan badan organisasi</i> ❖ <i>Pengadaan kawasan</i>	Sumberdaya
Proses-proses	<i>Bagaimana cara melakukannya?</i> Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	❖ <i>Cocoknya proses-proses pengelolaan yang digunakan</i>	Efisiensi dan kesesuaian

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Fokus dari evaluasi
Output	Apakah hasilnya? Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa	❖ Hasil dari tindakan-tindakan pengelolaan ❖ Jasa dan produk	Efektivitas
Hasil Akhir	Apa yang telah kita capai? Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	❖ Dampak: efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Efektivitas dan kesesuaian

B. PENILAIAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Mempertimbangkan bahwa METT lebih banyak difokuskan untuk penilaian efektivitas kawasan daratan, maka untuk kawasan konservasi yang didominasi oleh perairan dilakukan dengan menggunakan *Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Area*, yang merupakan adopsi dari METT. Tujuan Scorecard ini adalah untuk membantu pengelola kawasan konservasi perairan menentukan dimana kesuksesan mereka dan dimana sektor yang harus ditingkatkan.

Metode scorecard ini dapat mengevaluasi dan melaporkan performa dari pengelolaan yang telah dilakukan pada kawasan konservasi perairan. Dimana perangkat ini merupakan adaptasi dari perangkat penilaian yang ditujukan untuk kawasan konservasi daratan. Metode penilaian ini telah diadaptasi atau dikembangkan untuk memberikan gambaran singkat dari keadaan awal, upaya pengelolaan dan kemajuan yang telah dicapai selama periode tertentu, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pendekatan ini juga berguna untuk melihat isu prioritas dan meningkatkan proses pengelolaan, akan tetapi tidak banyak menggambarkan pencapaian dari tujuan pengelolaan.



III. PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN



III.

PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN



METT awalnya merupakan perangkat yang didesain untuk digunakan pengelola kawasan konservasi secara mandiri. Namun demikian dalam perkembangannya dirasakan perlu melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan proses penilaian adalah:

1. **Objektif**, hasil penilaian diharapkan menggambarkan kondisi faktual pengelolaan yang ada. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi dengan beberapa informasi pendukung untuk meyakinkan gambaran yang diberikan dalam penilaian.
2. **Transparan**, proses dan hasil penilaian dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepada publik.
3. **Partisipatif**, proses penilaian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian, mulai dari petugas lapangan pengelola kawasan konservasi hingga staf Kantor (Balai/bidang/seksi). Sedangkan pihak

eksternal yang penting untuk terlibat adalah masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah dari instansi yang terkait, mitra kerja pengelolaan, pihak swasta yang bekerja di dalam kawasan (penyedia jasa layanan ataupun fasilitas sarana kunjungan), pengelola daerah sekitar/area penyangga kawasan, dan otoritas ilmiah atau perguruan tinggi yang memiliki interest terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai.

4. **Reguler**, mengingat penilaian digunakan untuk memantau progress pengelolaan sehingga penilaian dilakukan secara regular setiap periode waktu tertentu. Pelaksanaan penilaian dilakukan minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan dilakukan setiap tahun ganjil untuk memudahkan penyatuan hasil penilaian secara nasional.
5. **Independen**, penilaian Efektivitas pengelolaan digunakan murni untuk kepentingan pengelolaan, sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan lainnya.
6. **Introspeksi**, proses penilaian ini dimaksudkan sebagai salah satu cara pengelola untuk melihat kembali progress pengelolaan yang dilakukan. Sehingga pengelola menyadari sejauh mana tahapan kegiatan yang telah dilakukan dan kekurangan-kekurangan yang penting untuk ditindaklanjuti.
7. **Berbagi Pengetahuan/Sharing knowledge**, para pihak yang terlibat dalam proses penilaian diharapkan dapat saling berbagi informasi dari proses penilaian yang dilakukan baik diantara pengelola dan pihak-pihak diluar pengelola.



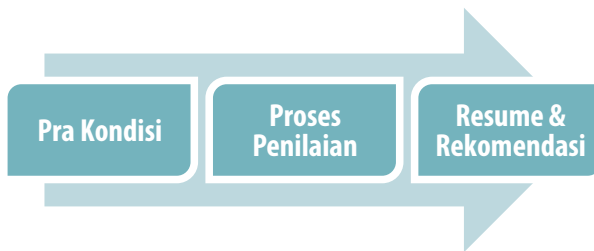
IV. PANDUAN PROSES PENILAIAN



IV.

PANDUAN PROSES PENILAIAN

Proses penilaian dilakukan melalui tahapan prakondisi, proses penilaian hingga penyusunan resume penilaian dan rekomendasi.



Gambar 2. Urutan Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

A. PRAKONDISI

Tahap prakondisi merupakan tahap persiapan dari mulai persiapan tim penilaian yang berasal dari lingkup internal unit pengelola, mengidentifikasi pihak-pihak eksternal yang perlu dilibatkan, hingga persiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penilaian.

Tahapan kegiatan dalam prakondisi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi rencana penilaian efektivitas pengelolaan kawasan
Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak pengelola kepada petugas dan staf yang dinilai mampu untuk melakukan penilaian.

b. Pembentukan tim penilaian internal

Tim internal di tingkat pengelola dapat dibentuk dan ditetapkan oleh kepala pengelola sesuai dengan kebutuhan pengelola yang bertugas untuk menyiapkan proses penilaian. Penilai internal akan terdiri dari staf lapangan dan staf kantor (balai, bidang, seksi dan resort). Keterlibatan dari masing-masing staf lapangan dan kantor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan pengelola kawasan serta disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

c. Penyiapan data dan hasil analisis

Setelah dilakukan penyiapan tim, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian mulai dari nilai penting kawasan, anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, gangguan kerawanan dan penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi yang akan dinilai. Data dan hasil analisis akan digunakan sebagai alat verifikasi penilaian. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dapat bersumber dari dokumen internal dan dokumen eksternal diantaranya :

No.	Jenis Dokumen	Penggunaan
1.	Rencana Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek	Melihat sejauh mana nilai penting kawasan dikelola
2.	Zonasi/Blok Pengelolaan	Melihat pola penggunaan kawasan
3.	Anggaran Pengelolaan	Melihat alokasi penganggaran terhadap kebutuhan pengelolaan nilai penting kawasan
4.	RTRW setempat	Melihat pola penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi
5.	Laporan-laporan survey/riset (internal, mitra maupun pihak lain)	Informasi mengenai status konservasi nilai-nilai penting kawasan, analisa sosial ekonomi masyarakat

No.	Jenis Dokumen	Penggunaan
6.	Dokumen pendukung lainnya	Terkait dengan SDM, sarana prasaran pengelola, inventarisasi potensi, ancaman kerawanan, kerjasama kemitraan, izin pemanfaatan kawasan, dan lain-lain.

- d. Identifikasi pihak eksternal yang perlu dilibatkan. Untuk memperkuat hasil penilaian dan menjaga independensi, maka proses penilaian ini dilakukan oleh pengelola kawasan bersama-sama dengan pihak terkait. Unsur penilai dari pihak terkait terdiri dari masyarakat dan pemangku kepentingan dari dan di sekitar kawasan.

Pemangku kepentingan diantaranya berasal dari badan/instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penilaian, mitra kerja, pihak swasta yang bekerja dalam kawasan konservasi (seperti penyedia jasa layanan ataupun sarana wisata alam), pengelola daerah penyangga hingga otoritas ilmiah seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang mempunyai informasi dan ketertarikan terhadap kawasan.

Pada kondisi tertentu dimana dibutuhkan pengetahuan khusus dari ahli, maka dalam proses penilaian dapat melibatkan tenaga ahli tertentu sebagai narasumber

B. PROSES PENILAIAN

Setelah tim internal dari pengelola terbentuk, maka proses penilaian dapat dilakukan melalui pertemuan antara tim internal dan pihak-pihak pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian, maka disarankan untuk tetap menggunakan setidaknya anggota tim yang sama. Jika hal ini tidak dimungkinkan, informasi dari penilai sebelumnya juga dibutuhkan untuk mengarahkan penilaian dan memastikan konsistensi atas evaluasi yang akan dilaksanakan

Proses penilaian dilakukan melalui sebuah forum diskusi terbuka. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator¹ yang memahami tentang proses penilaian efektivitas pengelolaan. Diskusi ini dihadiri pihak-pihak yang telah diidentifikasi pada tahap prakondisi dan diundang oleh pengelola kawasan.

Jawaban-jawaban yang diberikan pada proses penilaian diharapkan merupakan hasil diskusi yang terbuka dan kesepakatan peserta setelah memahami makna-makna dari setiap pertanyaan.

Selain menyimpulkan jawaban, penilaian perlu memberikan penjelasan atas kondisi yang ada serta langkah-langkah ke depan untuk mengatasi isu yang muncul.

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi kuisioner yang terdiri dari :

- a) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi (Lampiran 1)
Berisi detil penilaian dan informasi dasar tentang situs, seperti nama, ukuran dan lokasi, dll. Jika ada kode unik situs kawasan konservasi yang terdapat dalam World Database on Protected Area (WDPA) juga dimasukkan. WDPA dapat diakses melalui situs web UNEP-World Conservation Monitoring Center di www.unep-wcmc.org/wdpa. Informasi kontekstual lain seperti penetapan lokal, seperti taman nasional, cagar alam, dll, serta kategori manajemen kawasan konservasi IUCN, kepemilikan, jumlah staf dan anggaran juga dimasukkan dalam lembar pertama ini serta informasi tentang siapa yang terlibat dalam penilaian. Informasi di lembar kedua tentang penetapan internasional: misal Situs Warisan Dunia UNESCO, situs Man and Biosphere, dan situs lahan basah Ramsar.
- b) Data Ancaman Kawasan Konservasi (Lampiran 2)
Berisi daftar generik ancaman yang dihadapi kawasan konservasi. Pada lembar data ini penilai diminta untuk mengidentifikasi ancaman dan tingkat dampaknya terhadap kawasan konservasi.

1 Fasilitator akan disiapkan Ditjen KSDAE yang akan melibatkan mitra kerja, perguruan tinggi, dan staf KSDAE yang mempunyai kompetensi

c) Lembar Penilaian.

Lembar Penilaian dengan sekitar 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk kolom-kolom untuk mencatat detail dari penilaian. Semua pertanyaan harus diisi kecuali untuk pertanyaan yang tidak diwajibkan pada Kawasan Suaka Alam seperti Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

- ❖ **Pertanyaan - pertanyaan dan nilai**
Penilaian dibuat dengan menggunakan skor sederhana antara 0 (buruk) hingga 3 (sangat baik). Empat alternatif jawaban disediakan untuk setiap pertanyaan yang akan membantu penilai memberikan penilaian yang sesuai dengan tingkatan skor yang ada. Sebagai tambahan, terdapat pertanyaan tambahan yang terkait dengan tema kunci pada pertanyaan sebelumnya dan memberikan tambahan informasi dan nilai.
Apabila ada situasi dimana tidak satupun dari empat alternatif jawaban yang sangat sesuai dengan suatu kondisi kawasan konservasi, disarankan agar dipilih jawaban yang paling mendekati dan gunakan bagian komentar/penjelasan yang tersedia. **Pertanyaan yang tidak relevan dengan suatu kawasan konservasi tertentu harus ditinggalkan**, dengan menuliskan alasannya dibagian komentar/penjelasan (misalnya pertanyaan mengenai operator wisata pada kawasan cagar alam).
- ❖ **Keterangan**
Kolom keterangan ini berisi verifikasi-verifikasi untuk setiap jawaban yang dipilih yang akan memberi panduan pengelola menentukan tahapan yang dicapai atau skor yang sesuai.
- ❖ **Komentar/Penjelasan**
Kolom komentar/penjelasan disamping setiap pertanyaan memberikan tempat untuk penjelasan atas penilaian kualitatif dengan lebih detail. Kolom ini bisa diisi dengan pengetahuan pegawai setempat (dibanyak kasus, pengetahuan pegawai merupakan sumber yang

paling informatif dan terpercaya), dokumen referensi, hasil pemantauan atau kajian dan penilaian dari luar-intinya adalah agar semua yang membaca laporan ini mendapatkan gambaran kenapa penilaian dibuat. Penjelasan yang lengkap akan memberikan kepercayaan yang lebih baik atas hasil dari penilaian dengan membuat dasar pembuatan keputusan menjadi lebih transparan. Kolom ini memberikan informasi referensi dan informasi untuk pengelola kawasan di masa mendatang.

- ❖ Langkah kedepan untuk setiap pertanyaan, penilai diminta untuk mengidentifikasi setiap tindakan yang akan meningkatkan kinerja pengelolaan berupa intervensi pengelola kawasan.

Sebagai tambahan penjelasan untuk kawasan yang pengelolaannya meliputi daratan maka proses penilaian menggunakan Panduan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan sebagaimana pada Lampiran 3. Untuk kawasan konservasi dengan mandat pengelolaan meliputi kawasan perairan dan potensi di dalamnya², proses penilaian menggunakan *Scorecard* Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana pada Lampiran 4.

Langkah selanjutnya dalam proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan adalah perhitungan nilai indeks efektivitas pengelolaan berdasarkan nilai-nilai pada lembar penilaian. Cara perhitungan nilai indeks efektivitas pengelolaan selengkapnya tercantum pada Lampiran 5.

Pada pengulangan proses penilaian, diharapkan untuk melihat/merujuk pada hasil penilaian sebelumnya. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya dan kemudian dapat mengamati sejauh mana perkembangan pengelolaan kawasan dan melihat faktor-faktor penghambat dalam peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

² Jika suatu UPT dimandatkan untuk pelestarian terrestrial namun memiliki wilayah perairan maka hal-hal pengelolaan yang terkait dengan perairan akan dimasukkan dalam laporan narasi, sedangkan penilaian tetap menggunakan METT terrestrial.

C. PENYUSUNAN RESUME HASIL PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Tahapan selanjutnya setelah proses penilaian adalah menyusun resume hasil penilaian efektivitas pengelolaan. Resume hasil penilaian memberikan masukan berupa beragam opsi perbaikan sesuai dengan hasil diskusi yang berkembang pada proses penilaian dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi. Untuk mempermudah dalam penyusunan resume, digunakan tabel identifikasi yang memuat nilai-nilai setiap pertanyaan dan prosentase setiap aspek (Lampiran 6). Persentase masing-masing aspek tersebut menjadi salah satu input dalam resume hasil penilaian.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, dan isu prioritas, langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai langkah-langkah perbaikan dalam rangka upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan. Langkah-langkah perbaikan yang dicantumkan dalam rekomendasi diharapkan bersifat konkret dan spesifik sehingga tindak lanjut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pengelola kawasan, direktorat teknis, institusi di internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah ataupun pihak terkait lainnya.

Resume hasil penilaian yang mencakup beberapa substansi, yaitu:

- a. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan
- b. Faktor kekuatan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan (mengacu pada poin - poin dengan nilai maksimal)
- c. Faktor kelemahan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan.
- d. Isu prioritas yang perlu ditingkatkan.
- e. Resume langkah-langkah tindak lanjut yang didasarkan pada hasil penilaian (sesuai didalam formulir). Rekomendasi hasil penilaian akan diarahkan dan didistribusikan kepada unsur penilai dan Pemerintah pusat untuk mendapatkan respond dan tindak lanjut.

Resume hasil penilaian efektivitas pengelolaan disajikan sebagaimana pada Lampiran 7.



01.011



01.011



V. HASIL PENILAIAN



V. HASIL PENILAIAN



Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan rangkaian dari aktifitas penilaian, perumusan ringkasan/ resume hasil penilaian, pelaporan hasil dan tidak lanjut upaya-upaya perbaikan. Dimana pada akhirnya hasil-hasil yang diperoleh untuk seluruh kawasan konservasi di Indonesia perlu ditelaah lebih lanjut guna memberikan gambaran kondisi pengelolaan secara umum di Indonesia, selain itu hasil penilaian dapat dijadikan alat pemantauan oleh Direktorat Jenderal KSDAE terhadap aktifitas-aktifitas perbaikan yang dilakukan di setiap kawasan.

Oleh karena itu setelah proses penilaian, termasuk pembuatan resume penilaian, perlu dilakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diambil baik oleh pengelola kawasan konservasi maupun Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistem di pusat. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

A. PENYUSUNAN LAPORAN

Pengelola kawasan (UPT) mempunyai kewajiban menyusun laporan hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan menarasikan resume penilaian yang ada. Laporan disusun secara ringkas dan memuat beberapa hal, yaitu:

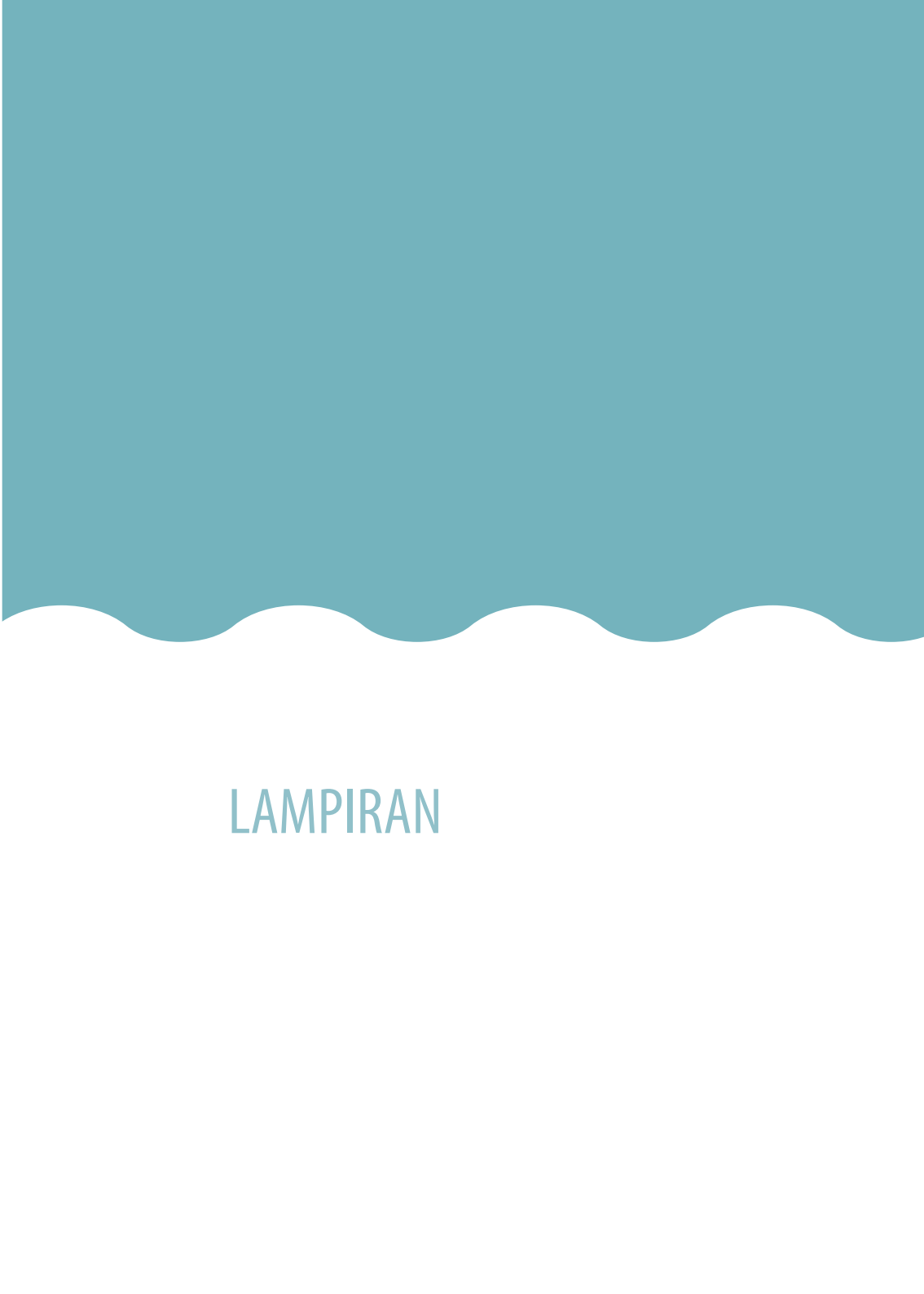
- ❖ Informasi kawasan
- ❖ Ancaman yang dihadapi saat ini
- ❖ Kondisi pengelolaan saat penilaian
- ❖ Rekomendasi langkah-langkah perbaikan dan rencana aksi baik secara jangka panjang maupun yang perlu segera dilakukan dalam waktu dekat.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI HASIL PENILAIAN

Laporan hasil penilaian efektivitas yang disusun oleh masing-masing pengelola (UPT) kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Penyampaian laporan ini dilakukan tidak lama setelah proses penilaian berlangsung.

Data-data hasil penilaian yang diterima oleh Direktur Jenderal KSDAE akan dikumpulkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi untuk kemudian dilakukan telaahan dan analisa lebih lanjut.

Telaahan dan analisa yang dihasilkan kemudian akan dijadikan dasar untuk penyusunan laporan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara nasional. Disamping itu informasi juga digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan, baik yang akan dilakukan oleh Ditjen KSDAE maupun yang perlu diinformasikan ke lembaga-lembaga yang dirasakan mempunyai otoritas dalam peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi

Nama, Afiliasi dan detil kontak penanggung jawab penyelesaian METT (termasuk alamat email)					
Tanggal pelaksanaan penilaian					
Nama Kawasan Konservasi					
Kode situs WDPa (dapat ditemukan di www.unep-wcmc.org/wdpa)					
Penetapan	Nasional	Kategori IUCN	Internasional (silakan dilengkapi juga pada halaman sebelah)		
Negara					
Lokasi Kawasan Konservasi (provinsi dan jika dimungkinkan juga peta acuan)					
Tanggal penetapan					
Detil Kepemilikan (Silakan di conteng)		Negara	Swasta	Masyarakat	Lainnya
Otoritas Manajemen					
Luas Kawasan Konservasi (Ha)					
Jumlah Staf	Permanen		Temporer		
Anggaran Tahunan (Rupiah) – tanpa anggaran gaji staf		Dana (operasional) rutin		Dana proyek / tambahan lain	
Apakah nilai utama penetapan Kawasan Konservasi					
Tuliskan dua tujuan primer pengelolaan Kawasan Konservasi					
Tujuan Pengelolaan 1					
Tujuan Pengelolaan 2					
Jumlah orang yang terlibat dalam menyelesaikan penilaian					
Termasuk (conteng kotak)	☐ Pengelola Kaw. Konservasi	☐ Staf Kaw. Konservasi	☐ Staf Lembaga Kaw. Konservasi. lain	☐ LSM	
	☐ Masy.Lokal	☐ Donors	☐ Ahli dari luar	☐ Lainnya	
Harap dicatat jika penilaian dilakukan dengan asosiasi dengan projek tertentu, atas nama suatu organisasi atau donor					

[illegible]

Lampiran 2. Ancaman Kawasan Konservasi

Silakan contreng semua ancaman yang relevan :

Tinggi : ancaman-ancaman yang memiliki nilai merusak yang serius;

Sedang : ancaman yang memiliki dampak negatif;

Rendah : ancaman yang ada tetapi tidak memiliki dampak serius;

N/A : ancaman tidak ada atau tidak berlaku di kawasan konservasi tersebut.

1. Pembangunan pemukiman dan komersial didalam kawasan konservasi

Ancaman dari pemukiman manusia atau penggunaan lahan bukan pertanian dengan dampak (*footprint*) yang substansial

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				1.1 Perumahan dan pemukiman
				1.2 Kawasan komersil dan industri
				1.3 Infrastruktur wisata dan rekreasi

2. Budidaya pertanian dan perikanan didalam kawasan konservasi

Ancaman dari pertanian dan penggembalaan akibat perluasan dan intensifikasi pertanian, termasuk silvikultur, marikultur, dan akuakultur

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				2.1 Budidaya non kayu tahunan atau sepanjang tahun
				2.1a Perladangan obat terlarang (<i>drugs</i>)
				2.2 Perkebunan kayu dan pulp
				2.3 Peternakan dan penggembalaan
				2.4 Akuakultur laut dan air tawar

3. Produksi energi dan pertambangan di dalam kawasan konservasi

Ancaman dari produksi sumber-sumber non-biologis

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				3.1 Pengeboran minyak dan gas
				3.2 Pertambangan dan penggalian
				3.3 Pembangkit energi, termasuk bendungan untuk PLTA

4. Koridor transportasi dan jasa dalam kawasan konservasi

Ancaman dari koridor transportasi yang panjang dan lebar dan kendaraan yang berjalan termasuk keterkaitan kematian satwa liar

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				4.1 Jalan dan rel kereta (termasuk satwa yang mati di jalanan)
				4.2 Jalur layanan dan jasa (cth. kabel listrik dan telepon)
				4.3 Jalur dan kanal perkapalan
				4.4 Jalur penerbangan

5. Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis didalam kawasan konservasi

Ancaman dari penggunaan konsumtif sumberdaya biologis “liar” termasuk efek pemanenan yang disengaja maupun tidak disengaja; termasuk perburuan atau pengendalian spesies tertentu (catatan: ini termasuk perburuan dan pembunuhan satwa)

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				5.1 Perburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat (termasuk akibat konflik manusia dan satwa liar)
				5.2 Pengumpulan tanaman darat atau produk tanaman (bukan kayu)
				5.3 Pembalakan dan pemanenan kayu
				5.4 Pemancingan, pembunuhan dan pemanenan sumberdaya air

6. Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi

Ancaman dari kegiatan manusia yang merubah, menghancurkan, atau mengganggu habitat dan spesies yang diasosiasikan dengan penggunaan non-konsumtif sumberdaya biologis

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				6.1 Kegiatan rekreasi dan wisata
				6.2 Perang, kerusakan sipil dan latihan militer

				6.3 Penelitian, pendidikan dan kegiatan terkait pekerjaan lain di Kawasan Konservasi
				6.4 Kegiatan pengelola kawasan konservasi (cth. pembuatan bangunan atau penggunaan kendaraan, pengairan buatan dan bendungan)
				6.5 Vandalisme, kegiatan merusak atau ancaman terhadap pegawai atau pengunjung kawasan konservasi

7. Modifikasi sistem alam

Ancaman dari kegiatan lain yang mengkonversi atau merusak habitat atau merubah fungsi ekosistem

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				7.1 Api dan penahan api (termasuk pembakaran secarasengaja)
				7.2 Bendungan, modifikasi hidrologis dan pengelolaan / pemanfaatan air
				7.3a Peningkatan fragmentasi di kawasan konservasi
				7.3b Isolasi dari habitat alami lain (cth. deforestasi, bendungan tanpa jalur yang efektif untuk mengakomodasi keperluan satwa air)
				7.3c "Efek tepi" lain yang berpengaruh terhadap nilai kawasan konservasi
				7.3d Kehilangan spesies kunci (cth. predator puncak, penyerbuk, dll)

8. Masalah spesies atau gen invasif dan bermasalah

Ancaman dari tanaman, satwa, pathogen/mikroba atau materi genetik darat dan air baik asli maupun dari luar yang memiliki efek yang membahayakan keanekaragaman hayati setelah pengenalan, penyebaran dan/atau peningkatan populasi

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				8.1 Tanaman invasif non-native/ asing (rerumputan)
				8.1a Satwa invasif non-native/asing
				8.1b Patogen (non-native atau native tetapi menimbulkan masalah baru/meningkat
				8.2 Pengenalan materi genetik (cth. organisme dengan genetik yang di modifikasi)

9. Polusi yang masuk atau muncul didalam kawasan konservasi

Ancaman dari pengenalan materi atau energi eksotik dan/atau berlebih dari *point* dan *non-point sources*

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				9.1 Saluran buangan rumah tangga / saluran air limbah kota
				9.1a Saluran pembuatan atau air limbah dari fasilitas Kawasan Konservasi (cth. toilet, hotel, dll)
				9.2 Limbah dan buangan industri, pertambangan dan militer (cth. kualitas air yang buruk buangan dari bendungan, cth suhu yang tidak normal, de-oksigenasi, polusi lain)
				9.3 Pembuangan dari pertanian dan kehutanan (cth. pupuk dan pestisida yang berlebihan)
				9.4 Sampah dan sampah padat
				9.5 Polusi yang terbawa udara
				9.6 Energi yang berlebih (cth. polusi panas, lampu, etc)

10. Peristiwa geologis

Peristiwa geologis mungkin merupakan bagian dari rezim gangguan alami di banyak ekosistem, tetapi peristiwa ini dapat menjadi ancaman jika suatu spesies atau habitat menjadi rusak atau kehilangan kepentingan dan kerawanan terhadap gangguan kapasitas manajemen untuk merespon beberapa perubahan ini mungkin terbatas.

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				10.1 Gunung berapi
				10.2 Gempa bumi/Tsunami
				10.3 Salju/Tanah longsor
				10.4 Erosi dan pengendapan garam/tanah (cth. perubahan di pantai atau dasar sungai)

11. Perubahan iklim dan cuaca buruk

Ancaman dari perubahan iklim jangka panjang mungkin terkait dengan perubahan iklim jangka panjang dan peristiwa iklim/cuaca buruk lain diluar variasi rentang alam

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				11.1 Perubahan dan kerusakan habitat
				11.2 Kekeringan
				11.3 Suhu ekstrim
				11.4 Badai dan banjir

12. Ancaman budaya dan sosial spesifik

Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	
				12.1 Hilangnya kaitan budaya, pengetahuan lokal dan/atau praktik pengelolaan
				12.2 Penurunan alami nilai-nilai penting situs budaya
				12.3 Kehancuran bangunan warisan budaya, taman, situs, dll

Lampiran 3. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
1. Status Hukum Apakah kawasan konservasi ini memiliki status hukum? Context	Kawasan Konservasi ini tidak pernah ditetapkan secara hukum	<i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	0		
	Ada kesepakatan bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara umum tetapi prosesnya belum dimulai	<i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	1		
	Kawasan konservasi tersebut dalam proses penetapan status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat, yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional)	<i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	2		
	Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal	<i>Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/Menhutbun/Mentan/ Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
2. Peraturan kawasan konservasi Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan <i>Planning</i>	Tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin disisi 0	0		
	Ada beberapa peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin disisi 1	1		
	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada beberapa kelemahan atau gap	Apabila penataan Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan	2		
	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	Apabila Penataan kawasan (zonasi/blok) telah disahkan.	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
3. Penegakan hukum Dapatkan pegawai (cth. mereka yang bertanggung jawab mengelola situs) menegakkan peraturan kawasan konservasi dengan cukup baik? <i>Input</i>	Pegawai tidak memiliki kapasitas/sumberdaya yang efektif untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	<i>Tidak terdapat staf/Polhut/PPNS Resort yang khusus mengurus kawasan</i>	0		
	Terdapat kekurangan besar dalam kapasitas/sumberdaya pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi (cth. kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patroli, kurang dukungan kelembagaan)	♣ <i>Terdapat staf/Polhut/PPNS, namun anggaran patroli tidak tersedia</i> ♣ <i>Tidak terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola</i>	1		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan	♣ <i>Terdapat staf/Polhut/PPNS. Anggaran patroli tersedia namun belum secara spesifik menegakkan untuk patroli di kawasan yang dikelola.</i> ♣ <i>Penegakan hukum dimaksud tidak selalu untuk yustisia, namun juga termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi peraturan.</i>	2		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang sangat baik untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	♣ <i>Terdapat staf/Polhut/PPNS beserta anggaran patrolinya/pendukung lainnya.</i> ♣ <i>Terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
4. Tujuan utama dari kawasan konservasi Apakah pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati? <i>Planning</i>	Belum ada tujuan yang disepakati untuk kawasan konservasi ini	Belum menyusun Rencana Pengelolaan (RP) yang memuat tujuan pengelolaan	0		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi tidak dikelola sesuai tujuan -tujuan ini	Rencana Pengelolaan (RP) sudah disusun dan memuat tujuan pengelolaan secara spesifik, namun kegiatan tidak mengacu pada RP	1		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan hanya memenuhi beberapa tujuan tersebut	kegiatan esensial sesuai tujuan pengelolaan yang direncanakan dalam RP sebagian telah dilaksanakan	2		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	Semua kegiatan esensial untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam RP telah dilakukan	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
5. Desain kawasan konservasi	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti pencapaian tujuan utama kawasan konservasi yang sangat sulit	Kawasan tidak memadai dari sisi luas; bentuk; dan lokasi untuk upaya konservasi tujuan pengelolaan.	0		
Apakah kawasan konservasi memiliki luasan dan bentuk yang tepat untuk melindungi spesies, habitat, proses-proses ekologis dan tangkapan air sesuai kepentingan konservasi kuncinya? <i>Planning</i>	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti sulit pencapaian tujuan utama yang sulit tetapi beberapa kegiatan mitigasi tengah dilakukan (cth perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai)	♣ Kawasan tidak memadai namun ada upaya membangun kesepakatan dengan pemangku lahan sekitarnya untuk konservasi tujuan pengelolaan ♣ Sebagai contoh perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai	1		
	Desain kawasan konservasi tidak signifikan menghalangi pencapaian tujuan, tetapi perlu ditingkatkan (cth. terkait dengan proses-proses ekologis skala besar yang terjadi)	Desain kawasan relatif memadai namun perlu ditingkatkan antara lain melalui upaya konektivitas dengan kawasan konservasi lain; adanya areal penyangga yang merupakan perluasan habitat yang ada, dll	2		
	Desain kawasan konservasi membantu pencapaian tujuannya: desain memadai untuk konservasi spesies dan habitat ; dan menjaga proses-proses ekologis seperti aliran permukaan dan bawah tanah pada skala DAS, pola gangguan alam, dll	Kawasan memadai baik secara luas, lokasi dan bentuknya sehingga tidak menghalangi pencapaian tujuan	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
6. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi Apakah batas kawasan diketahui dan dikukuhkan? <i>Process</i>	Batas kawasan konservasi tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat /pengguna lahan yang bertetangga	<i>Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan</i>	0		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/ pengguna lahan yang bertetangga	<i>Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan</i>	1		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal /pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikukuhkan dengan tepat	<i>Petugas dan masyarakat mengetahui batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat)</i>	2		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal /pengguna lahan yang bertetangga dan di kukuhkan dengan tepat	<i>Tata batas sudah temu gelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditanda tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait pal batas</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
7. Rencana pengelolaan Apakah ada rencana pengelolaan dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan? <i>Planning</i>	Tidak ada rencana pengelolaan untuk Kawasan Konservasi ini	RP belum disusun	0		
	Rencana pengelolaan tidak disiapkan atau telah disiapkan tetapi belum diimplementasikan	Cukup jelas	1		
	Rencana pengelolaan telah ada tetapi baru sebagian yang diimplementasikan karena kendala pendanaan atau masalah lain	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah disahkan dan sebagian kegiatan penting telah dilakukan (tercantum dalam alokasi budget pengelola atau hibah)	2		
	Rencana pengelolaan telah ada dan tengah diimplementasikan	Kegiatan esensial dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah dilakukan (tercantum pada alokasi budget pengelola atau didanai melalui kerjasama (MoU) dengan pihak lain (Pemda/LSM/Universitas/swasta)	3		
Nilai tambahan: <i>Planning</i>					
7a. Proses perencanaan	Proses perencanaan memberikan kesempatan yang cukup bagi paripihak untuk mempengaruhi rencana pengelolaan	Konsultasi publik terhadap RP dengan melibatkan para pihak	+1		
7b. Proses perencanaan	Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan	Terdapat rencana review/evaluasi RP. Apabila RP telah disusun sesuai dengan PP Nomor 28 tahun 2011 dengan periode 10 tahun	+1		
7c. Proses perencanaan	Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin dimasukkan kedalam perencanaan	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) Apakah ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan? <i>Planning</i>	Tidak ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)	Kawasan tidak memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)	0		
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) tetapi baru beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan	Kawasan memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan telah diimplementasikan sebagian	1		
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan banyak kegiatan telah diimplementasikan	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) sebagian besar telah diimplementasikan	2		
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan semua kegiatan telah diimplementasikan	<i>Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) diimplementasikan seluruhnya</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
9. Inventarisasi sumberdaya Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini? <i>Input</i>	Terdapat sedikit informasi tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi	Belum pernah dilakukan inventarisasi potensi kawasan atau survey potensi kawasan	0		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan	Inventarisasi/survey potensi/monitoring kawasan dilakukan namun belum mengarah untuk kepada tujuan pengelolaan	1		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	Inventarisasi/survey potensi/monitoring kawasan dilakukan terhadap aspek-aspek fitur utama kawasan	2		
	Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan	Kegiatan Inventarisasi/survey potensi/monitoring kawasan dilakukan pada semua fitur-fitur kawasan dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM)	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
10. Sistem perlindungan Apakah sistem telah memadai untuk mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya dalam Kawasan Konservasi? <i>Process/ Outcome</i>	Sistem perlindungan (patroli, perijinan, dll) tidak ada atau tidak efektif mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	❖ Tidak terdapat sistem perlindungan yang dibangun ❖ pernah dilakukan patroli kawasan dan belum ada sistem pemanfaatan	0		
	Sistem perlindungan hanya efektif sebagian dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	Misal sistem baru diterapkan sebagian (hanya patroli saja namun belum ada sistem pemanfaatan)	1		
	Sistem perlindungan secara moderat efektif mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	Terdapat kegiatan patroli, protap patroli dan pengurusan SIMAKSI namun hanya pada sebagian kawasan	2		
	Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	Sistem patroli, pengurusan SIMAKSI hingga kerjasama pemanfaatan HHBK sudah berjalan, terdapat protapnya. Terdapat sistem patroli yang baik dan menjangkau wilayah yang rawan.	3		
	11. Riset Apakah program pengelolaan berdasarkan hasil survey atau riset? <i>Riset dan survey mencakup kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh pengelola ataupun pihak lain.</i> <i>Process</i>	Belum ada penelitian atau survey kawasan	0		
	Ada sedikit survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen). Data yang dihasilkan masih berupa cuplikan-cuplikan data dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	1		
	Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen). Ada database namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	2		
	Ada program survey dan riset yang komprehensif dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	Terdapat roadmap atau research need untuk kawasan (kebutuhan kebutuhan kawasan, kebutuhan penelitian tertuang dalam RP) – Ada database dan pemutakhiran data	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
12. Pengelolaan sumberdaya Apakah pengelolaan sumberdaya yang intensif tengah dilakukan? Process	Pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan	♣ ♣ Kawasan tidak/ belum dikelola Hanya ada aktifitas pengamanan	0		
	Sangat sedikit kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, spesies dan proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis yang sedang dilakukan.	♣ ♣ Pengelolaan terhadap fitur utama masih minimal Kegiatan terkait tujuan pengelolaan sangat terbatas	1		
	Banyak kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis sedang dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan	♣ ♣ Pengelolaan terhadap fitur utama kawasan sudah dilakukan, tetapi belum mencakup penyelesaian permasalahan terhadap fitur utama Kegiatan terkait tujuan pengelolaan telah dilakukan,	2		
	Kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis secara substansial atau sepenuhnya tengah/ sedang dilaksanakan	Pengelolaan terhadap fitur utama dan fitur kawasan lainnya sudah dilakukan termasuk upaya mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan pengelolaan	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
13. Jumlah pegawai Apakah sudah ada cukup pegawai untuk mengelola Kawasan Konservasi <i>Inputs</i>	Tidak ada pegawai	♣ Pegawai yang dimaksud adalah yang bertugas di kawasan yang dinilai. ♣ Untuk UPT BKSDA adalah petugas resort	0		-
	Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk kegiatan pengelolaan yang penting	Pegawai belum cukup, baik jumlah dan fungsi (Pengelolaan yang penting : tenaga administrasi dan teknis)	1		
	Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis	Pegawai cukup secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) namun jumlahnya kurang	2		
	Jumlah pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Pegawai cukup secara fungsi dan jumlah	3		
14. Staf terlatih Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan? <i>Inputs/Process</i>	Pegawai kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi	Tidak ada staf/petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	0		
	Staf terlatih dan keahlian relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	Jumlah dan tingkat keahlian staf kurang dan belum sesuai dengan tujuan pengelolaan	1		
	Staf terlatih dan keahlian memadai, tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	Jumlah dan tingkat keahlian staf memadai namun perlu ditingkatkan sesuai tujuan pengelolaan	2		
	Staf terlatih dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Keahlian staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan. identifikasi kupa-kupu	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
15. Anggaran saat ini Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi? <i>Inputs</i>	Tidak ada anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	0		
	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas untuk mengelola	Sudah jelas	1		
	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	Sudah jelas	2		
	Anggaran yang tersedia mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	3		
16. Kepastian anggaran Apakah ada kepastian anggaran? <i>Inputs</i>	Tidak ada kepastian anggaran untuk kawasan konservasi dan pengelolaan sepenuhnya tergantung pada pihak luar atau pendanaan sangat tidak pasti	Tidak ada anggaran spesifik untuk pengelolaan kawasan	0		
	Ada sedikit kepastian anggaran dan kawasan konservasi tidak dapat berfungsi secara memadai tanpa bantuan dana pihak luar	Hanya ada alokasi anggaran pengamanan untuk kawasan	1		
	Ada cukup kepastian anggaran inti (core budget) untuk kegiatan regular kawasan konservasi tetapi banyak inovasi dan inisiatif yang tergantung pendanaan dari luar	Terdapat alokasi anggaran pengelolaan untuk kawasan, (APBN maupun non APBN)	2		
	Ada kepastian anggaran untuk Kawasan Konservasi dan pemenuhan pengelolaan	Ada alokasi anggaran (APBN/non APBN) yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sesuai tujuan	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
17. Pengelolaan anggaran Apakah anggaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang penting? <i>Process</i>	Pengelolaan anggaran tidak baik dan secara signifikan mengurangi Efektivitas pengelolaan	<i>Misalnya, anggaran yang turun terlambat pada tahun berjalan</i>	0		
	Pengelolaan anggaran kurang baik dan mengurangi Efektivitas	<i>Anggaran tidak membiayai kegiatan pengelolaan prioritas</i>	1		
	Pengelolaan anggaran sudah memadai tetapi perlu ditingkatkan	<i>anggaran yang ada digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan pengelolaan</i>	2		
	Pengelolaan anggaran sangat baik dan memenuhi kebutuhan pengelolaan	<i>Anggaran sesuai dengan rencana kegiatan pada RP</i>	3		
18. Perlengkapan Apakah perlengkapan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengelolaan? <i>Input</i>	Terdapat sedikit atau tidak ada perlengkapan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan	<i>Tidak ada perlengkapan</i>	0		
	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	<i>Terdapat perlengkapan namun masih sangat kurang untuk pengelolaan</i>	1		
	Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan	<i>Perlengkapan yang ada belum sepenuhnya memadai/ minimal untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan</i>	2		
	Perlengkapan dan fasilitas yang ada telah memadai	<i>Terdapat perlengkapan (perlengkapan lapangan, mobilisasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) yang memadai untuk mendukung pengelolaan – pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil (< 10 hektar), sarana digabung dengan kawasan lainnya</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
19. Pemeliharaan perlongkapan Apakah perlongkapan yang ada di- pelihara secara memadai? <i>Process</i>	Ada sedikit atau tidak ada pemeliharaan untuk perlongkapan dan fasilitas	<i>Tidak ada pemeliharaan</i>	0		
	Ada pemeliharaan yang bersifat <i>ad hoc</i> untuk perlongkapan dan fasilitas	<i>Pemeliharaan dilakukan secara insidental</i>	1		
	Ada pemeliharaan dasar untuk perlongkapan dan fasilitas	Pemeliharaan dilakukan pada perlongkapan dan fasilitas yang penting	2		
	Perlongkapan dan fasilitas dipelihara secara memadai	<i>Semua perlongkapan dan fasilitas dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>	3		
20. Pendidikan dan penyadaran Apakah ada perencanaan program pen- didikan untuk memenuhi tujuan dan ke- butuhan? <i>Process</i>	Tidak ada program pendidikan dan penyadaran	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Ada program pendidikan dan penyadaran yang terbatas dan bersifat <i>ad hoc</i>	<i>Kegiatan tidak terprogram dan insidental</i>	1		
	Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	<i>Kegiatan terprogram namun dinilai kurang secara kuantitas</i>	2		
	Terdapat program pendidikan dan penyadaran yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan	<i>Terprogram dan dilaksanakan dengan cukup</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
21. Perencanaan penggunaan lahan dan air Apakah perencanaan penggunaan lahan dan air memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi dan kegiatan/kebijakan yang merugikan kelangsungan kawasan Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi , tetapi kegiatan yang ada tidak merugikan kelangsungan kawasan Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagai memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sepeuhnya memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi <i>Planning</i>	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi dan kegiatan/kebijakan yang merugikan kelangsungan kawasan	❖ Pemanfaatan air di luar kawasan konservasi bereksistem rawa/gambut yang berlebihan dan (membuat rawa menjadi kering dan rentan kebakaran) ❖ Pembangunan di luar yang membuat kawasan terisolasi atau tidak terkoneksi dengan KK lainnya	0		
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi , tetapi kegiatan yang ada tidak merugikan kelangsungan kawasan	RTRW kurang mendukung fungsi kawasan Contoh : pemanfaatan air di luar kawasan konservasi yang terletak di hulu.	1		
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagai memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi	RTRW sebagian mendukung fungsi kawasan	2		
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sepeuhnya memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi	RTRW sesuai kaidah Pembangunan di sekitar kawasan telah memadukan dengan kawasan konservasi, misal menyediakan konektivitas dengan KK lain, menyediakan buffer/penyangga kawasan, pengelolaan mempertimbangkan sistem DAS yang ada dll	3		
Nilai tambahan: Perencanaan lahan dan air					
21a: Perencanaan lahan dan air untuk konservasi habitat	Perencanaan dan pengelolaan di dalam DAS atau lanskap (bentang lahan) lokasi kawasan konservasi memasukkan provisi untuk kondisi lingkungan yang memadai (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air, tingkat polusi air, dll) untuk menjaga habitat yang relevan	Lansekap yang didalamnya terdapat KK sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk menjamin keberlangsungan habitat-habitat penting Contoh : kawasan di hilir, perencanaan di hulu harus mempertimbangkan potensi polusi air ke dalam kawasan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
21b: Perencanaan lahan dan air untuk keter- hubungan (konektifitas)	Pengelolaan koridor penghubung kawasan konservasi memberikan jalur bagi satwa liar menuju habitat kunci diluar kawasan konservasi (cth. memungkinkan ikan bermigrasi antara lokasi pemijahan air tawar dan laut atau memungkinkan migrasi satwa)	Apakah koridor sebagai jalur penghubung satwa berfungsi dengan baik.	+1		
21c: Perencanaan lahan dan air untuk jasa-jasa ekosistem dan konservasi spesies	"Perencanaan menjawab kebutuhan khusus ekosistem dan/atau kebutuhan spesies tertentu pada skala ekosistem (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air tawar untuk kelangsungan spesies tertentu, pengelolaan api untuk menjaga habitat savana, dll)"	Apakah pembangunan di sekitar kawasan konservasi, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di dalam kawasan.	+1		
22. Pemerintah dan swasta di sekitar Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar? <i>Process</i>	Tidak ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengelola lahan dan air di sekitar	Sudah jelas	0		
	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama	Sudah jelas	1		
	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar, tetapi hanya ada kerjasama terbatas	Kerjasama pemanfaatan/penggunaan di kawasan	2		
	Ada komunikasi regular antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar, dan ada kerjasama substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi	Kerjasama antara pengelola dengan mitra disertai dengan forum penguat. Misal, terdapat forum pengelolaan seperti mitra Kutai, dll	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
23. Masyarakat adat Apakah masyarakat adat yang tinggal atau secara reguler menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam keputusan pengelolaan?	Masyarakat adat tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	0		
	Masyarakat adat dapat memberikan sedikit masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengelolaan	<i>Masyarakat adat terlibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan zonasi/blok</i>	1		
	Masyarakat adat secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevant terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka perlu ditingkatkan	<i>masyarakat adat dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal zonasi/blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP/kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional.</i>	2		
	Masyarakat adat secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management	Sudah jelas	3		
Process					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
24. Masyarakat lokal Apakah masyarakat lokal yang tinggal ada berdekatan dengan kawasan konservasi dapat memberikan masukan? <i>Process</i>	Masyarakat lokal tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Masyarakat lokal dapat sedikit memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan	<i>Masyarakat lokal terlibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan zonasi/blok</i>	1		
	Masyarakat lokal secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka dapat ditingkatkan	<i>masyarakat lokal dapat terlibat dalam penentuan sebagai arah pengelolaan, misal zonasi/blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP, kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional..</i>	2		
	Masyarakat lokal secara langsung berpartisipasi terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth co-manajemen	<i>sudah jelas</i>	3		
	Nilai tambahan: Masyarakat lokal				
24 a. Dampak terhadap masyarakat	Terdapat komunikasi dan kepercayaan yang terbuka antara masyarakat lokal dan/atau tradisional, para pihak dan pengelola kawasan konservasi	<i>Ada forum reguler</i>	+1		
24b. Dampak terhadap masyarakat	Terdapat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<i>Sudah jelas</i>	+1		
24c. Dampak terhadap masyarakat	Masyarakat lokal dan/atau tradisional secara aktif mendukung kawasan konservasi	<i>Terdapat peraturan daerah/peraturan desa, adat istiadat (aktif) yang mendukung kelestarian kawasan</i>	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
25. Keuntungan ekonomis Apakah KK memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal, cth pendapatan, pekerjaan, pembayaran jasa lingkungan? <i>Outcomes</i>	Kawasan konservasi tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung bagi masyarakat lokal	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Potensi keuntungan ekonomis secara langsung sudah diketahui dan direncanakan untuk direalisasikan	<i>Pemanfaatan wisata alam atau jasa lingkungan</i>	1		
	Terdapat aliran keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal	<i>Keuntungan ekonomi pada masyarakat masih bersifat sampingan</i>	2		
	Kawasan konservasi memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat lokal	<i>Sebagai mata pencaharian utama masyarakat lokal bergantung pada kegiatan di dalam KK</i>	3		
26. Monitoring dan evaluasi Apakah monitoring kegiatan pengelolaan mempengaruhi kinerja? <i>Planning/ Process</i>	Tidak ada monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi secara ad hoc , tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara reguler	<i>Monev dilakukan secara insidental</i>	1		
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan	<i>Monev dilaksanakan secara reguler</i>	2		
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	<i>Dilaksanakan secara reguler dan adaptif, misal sistem monitoring & evaluasi melalui METT, SMART Patrol atau RBM</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
27. Fasilitas pengunjung Apakah fasilitas pengunjung memadai? <i>Outputs</i>	Tidak ada fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung meskipun kebutuhannya telah teridentifikasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	<i>Misal hanya ada papan informasi/papan petunjuk</i>	1		
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung cukup memadai untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan	<i>Terdapat papan informasi, papan petunjuk, gerbang dan ruang informasi</i>	2		
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung sangat baik untuk tingkat kunjungan saat ini	<i>Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi, kenyamanan pengunjung)</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
28. Operator wisata komersil Apakah operator wisata komersil berkontribusi pada pengelolaan kawasan konservasi? <i>Process</i>	Sedikit/tidak ada hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata yang menggunakan kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Terdapat hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan	<i>Terdapat operator luar</i>	1		
	Terdapat kerjasama terbatas antara pengelola kawasan dengan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	<i>Terdapat IUPJWA</i>	2		
	Terdapat kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	<i>Kerjasama menyangkut penambahan pengalaman/edukasi pengunjung dalam konservasi</i>	3		
29. Pungutan (PNBP atau pungutan lain) Jika pungutan (cth. Biaya masuk atau denda) diterapkan apakah akan membantu pengelolaan KK? <i>Inputs/Process</i>	Meskipun secara teori pungutan diterapkan, tetapi pungutan tersebut tidak dikumpulkan	<i>PNBP tidak dipungut di wilayah yang sudah ditetapkan dalam PP No 12/2014</i>	0		
	Pungutan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi pada Kawasan Konservasi atau lingkungan sekitarnya	<i>Pungutan hanya PNBP</i>	1		
	Pungutan dikumpulkan, dan memberikan sedikit kontribusi pada Kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya	<i>Ada mekanisme pungutan lain selain PNBP yang berkontribusi kepada kawasan/lingkungan sekitarnya</i>	2		
	Pungutan dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial untuk KK dan lingkungan sekitarnya	<i>Belum ada mekanismenya di Indonesia</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
30. Kondisi nilai-nilai Bagaimana kondisi dari nilai-nilai penting konservasi bila dibandingkan dengan saat penunjukan kawasan? Outcomes	Banyak nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya yang penting sangat menurun/berkurang	Tujuan pengelolaan pada saat penunjukan sudah punah/turun drastis Misal : Apabila badak jawa di TN Ujung Kulon punah	0		
	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya telah sangat menurun/berkurang	Misal : populasi badak sumatera di TNKS yang telah punah, namun masih ada fitur utama pengelolaan lain yang masih ada (harimau sumatera dll)	1		
	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurang tetapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan	Fitur-fitur kawasan berkurang, tetapi fitur utama masih ada.	2		
	Nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya relatif utuh	Sudah jelas Data berasal dari hasil monitoring, Mandat kelola utama harus ada datanya. Hasil monitoring bisa oleh mitra atau hasil riset	3		
Nilai tambahan: Kondisi nilai-nilai					
30a: Kondisi nilai-nilai	Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring	Sudah jelas	+1		
30b: Kondisi nilai-nilai	Program pengelolaan yang spesifik sedang dilakukan untuk menghadapi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya	Sudah jelas, misal : Program Penangkaran Maleo di SM Bangkiriang, Banteng di Baluran, Badak di Way Kambas, mantangan di BBS, savana di Alas Purwo.	+1		
30c: Kondisi nilai-nilai	Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan Kawasan Konservasi	Sudah jelas, dilakukan secara rutin	+1		
TOTAL SCORE					





Lampiran 4. Scorecard Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
A. Konteks: Dimana kita sekarang? Penilaian ancaman penting dan kebijakan yang ada					
1. Status Hukum	Kawasan konservasi ini tidak pernah ditetapkan secara hukum	<i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	0		
Apakah kawasan konservasi ini memiliki status hukum? (atau dalam hal kasus kawasan milik swasta apakah kawasan tersebut tercantum dalam perjanjian atau yang serupa?) <i>Konteks</i>	Ada kesepakatan bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara umum tetapi prosesnya belum dimulai Kawasan konservasi tersebut dalam proses penetapan status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/ tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat, yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional) Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal	<i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	1		
		<i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	2		
		Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/Menhutbun/Mentan/ Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.	3		
Nilai Tambahan	a. Kawasan telah mendapatkan status pengakuan di tingkat regional dan/ atau internasional (jelaskan secara rinci dalam kolom komentar)	<i>Misalnya RAMSAR, Warisan Dunia dll</i>	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
2. Peraturan kawasan konservasi Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan (cth perburuan) <i>Perencanaan</i>	Tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi	<i>Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin disii 0</i>	0		
	Ada beberapa peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar	<i>Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin disii 1</i>	1		
	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada beberapa kelemahan atau gap	<i>Apabila penataan Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan</i>	2		
	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	<i>Apabila Penataan kawasan (zonasi/blok) telah disahkan.</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
3. Penegakan hukum Dapatkah pegawai (cth. Mereka yang bertanggung jawab mengelola situs) menegakkan peraturan kawasan konservasi dengan cukup baik? <i>Input</i>	Pegawai tidak memiliki kapasitas/sumberdaya yang efektif untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	Tidak terdapat staf/Polhut/PPNS Resort yang khusus mengurus kawasan yang dinilai	0		
	Terdapat kekurangan besar dalam kapasitas/sumberdaya pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi (cth. kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patrol, kurang dukungan kelembagaan)	❖ Terdapat staf/Polhut/PPNS, namun anggaran patroli tidak tersedia ❖ Tidak terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola	1		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan	❖ Terdapat staf/Polhut/PPNS. Anggaran patroli tersedia namun belum secara spesifik menegakkan untuk patroli di kawasan yang dikelola. ❖ Penegakan hukum dimaksud tidak selalu untuk yustisia, namun juga termasuk didalamnya kegiatan sosialisasi peraturan.	2		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang sangat baik untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	Terdapat staf/Polhut/PPNS beserta anggaran patrolinya/pendukung lainnya. Terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola	3		
	a. Terdapat sumber dukungan lain (sukarelawan, institusi nasional, masyarakat lokal)	Ada dukungan dana, SDM dari pihak lain melalui kerjasama dalam penegakan hukum	+1		
Nilai Tambahan	b. Pelanggaran secara reguler diproses hukum atau dikenakan denda	Cukup jelas	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
4. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi Apakah batas kawasan diketahui dan dikukuhkan? <i>Proses</i>	Batas kawasan konservasi tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	<i>Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan</i>	0		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	<i>Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan</i>	1		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local/ pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikukuhkan dengan tepat	<i>Petugas dan masyarakat mengetahui lokasi batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat)</i>	2		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local/ pengguna lahan yang bertetangga dan dikukuhkan dengan tepat	<i>Tata batas sudah temu gelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditanda tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya complain terkait pal batas</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
5. Integrasi kawasan dalam perencanaan pesisir yang lebih besar Apakah KK Perairan sudah menjadi bagian dalam perencanaan pesisir yang lebih luas?	Tidak/belum ada pembahasan tentang integrasi kawasan kedalam rencana rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten	<i>Cukup jelas</i>	0		
	Ada inisiasi pembicaraan tentang integrasi kawasan kedalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten, akan tetapi belum ada proses.	<i>Cukup jelas</i>	1		
	Kawasan dalam proses integrasi kawasan kedalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten	<i>Keberadaan dan status kawasan sudah tercantum dan diakui dalam draft final rencana tata ruang wilayah</i>	2		
	Kawasan merupakan bagian dari rencana rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten	<i>Keberadaan dan status kawasan sudah tercantum dan diakui dalam rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
Nilai Tambahan Catatan: Justifikasi/ bukti ilmiah dapat menggunakan berbagai sumber yang kompeten serta memenuhi standar ilmiah.	a. Kawasan merupakan bagian dari jejaring KK Perairan yang secara kolektif melestarikan fungsi ekosistem perairan yang lebih besar	Adanya justifikasi atau bukti ilmiah dan/atau adanya proses komunikasi dalam konteks pengelolaan jejaring KK perairan	+1		
	b. Kawasan merupakan bagian dari jejaring KK Perairan yang secara kolektif mewakili variasi bio-geografi di ekoregion laut	Adanya justifikasi atau bukti ilmiah dan/atau adanya proses komunikasi dalam konteks pengelolaan jejaring KK perairan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
6. Inventarisasi sumberdaya Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini? <i>Input</i>	Terdapat sedikit informasi yang tersedia tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi	Belum pernah dilakukan inventarisasi potensi kawasan atau survey potensi kawasan	0		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan	Inventarisasi/survey potensi/monitoring kawasan dilakukan namun belum mengarah untuk kepada tujuan pengelolaan	1		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	Inventarisasi/survey potensi/monitoring kawasan dilakukan terhadap aspek-aspek fitur utama kawasan dilakukan secara periodik	2		
	Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan	Kegiatan Inventarisasi/survey potensi/monitoring kawasan dilakukan pada semua fitur-fitur kawasan dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM)	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
7. Kesadaran dan Kepedulian Para pihak Apakah para pihak sadar dan peduli terhadap sumberdaya perairan dan gangguannya	Kurang dari 25% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan, gangguan, dan upaya pengelolaan	Cukup Jelas (melalui survey/kajian/analisis data)	0		
	Sekitar 25% - 50% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan dan gangguan-gangguannya	Cukup Jelas (melalui survey/kajian/analisis data)	1		
	Sekitar 50% - 75% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan dan gangguan-gangguannya	Cukup Jelas (melalui survey/kajian/analisis data)	2		
	Lebih dari 75% stakeholder sadar dan peduli terhadap kondisi sumberdaya perairan dan gangguan-gangguannya	Cukup Jelas (melalui survey/kajian/analisis data)	3		
TOTAL NILAI UNTUK KONTEKS (A): 26 ATAU MENYESUAIKAN					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
B. Perencanaan – Apa yang ingin kita capai? Penilaian desain dan perencanaan kawasan					
8. Tujuan utama dari kawasan konservasi Apakah pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati?	Belum ada tujuan yang disepakati untuk kawasan konservasi ini	Belum menyusun Rencana Pengelolaan (RP) yang memuat tujuan pengelolaan secara spesifik	0		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi tidak dikelola sesuai tujuan-tujuan ini	Rencana Pengelolaan (RP) sudah disusun dan memuat tujuan pengelolaan secara spesifik, namun kegiatan tidak mengacu pada tujuan yang ditetapkan	1		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan hanya memenuhi beberapa tujuan tersebut	kegiatan esensial sesuai tujuan pengelolaan yang direncanakan dalam RP sebagian telah dilaksanakan	2		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	Semua kegiatan esensial untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam RP telah dilakukan	3		
<i>Perencanaan</i>					
9. Rencana pengelolaan Apakah ada rencana pengelolaan dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan?	Tidak/belum ada rencana pengelolaan untuk kawasan konservasi ini	RP belum disusun	0		
	Rencana pengelolaan tengah disusun atau telah disusun tetapi belum diimplementasikan	Cukup jelas	1		
	Rencana pengelolaan telah disahkan tetapi baru sebagian yang dapat diimplementasikan (ada kendala pendanaan atau hal lain yang krusial)	Rencana Pengelolaa Jangka Panjang (RP) telah disahkan dan sebagian kegiatan penting telah dilakukan (tercantum dalam alokasi budget pengelola atau hibah)	2		
	Rencana pengelolaan yang telah disahkan tengah diimplementasikan	Kegiatan esensial dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah dilakukan (tercantum pada alokasi budget pengelola atau didanai melalui kerjasama (MoU) dengan pihak lain (Pemda/LSM/NGO/Universitas/private sector)	3		
<i>Perencanaan</i>					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
Nilai Tambahan	a. Terdapat rencana strategis pengelolaan	Renstra sudah disahkan	+1		
	b. Proses perencanaan memberikan peluang yang cukup bagi stakeholder kunci untuk mempengaruhi rencana pengelolaan	Berita acara dan/atau bukti lain yang menunjukkan keterlibatan stakeholder kunci dalam proses perencanaan	+1		
	c. Partisipasi stakeholder termasuk keterwakilan dari keragaman suku, agama, kelompok pengguna serta gender.	Berita acara dan/atau bukti lain yang menunjukkan keterwakilan stakeholder dalam proses perencanaan	+1		
	d. Proses perencanaan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari keputusan yang diambil	Cukup jelas	+1		
	e. Proses perencanaan mempertimbangkan budaya lokal termasuk praktek tradisional, sistem sosial, fitur budaya, situs bersejarah dan monumen.	Cukup jelas	+1		
	f. Terdapat jadwal dan proses untuk review periodik dan pemutakhiran rencana pengelolaan	Cukup jelas	+1		
	g. Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin tergabung dalam perencanaan	Cukup jelas	+1		
	h. Rencana pengelolaan terkait dengan pengembangan dan penegakan Peraturan	Cukup jelas	+1		
TOTAL NILAI UNTUK PERENCANAAN (B): 14 ATAU MENYESUAIKAN					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
C. Inputs – Apa yang kita butuhkan? Penilaian sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan					
10. Riset Apakah program pengelolaan berdasarkan hasil survey atau riset? <i>Proses</i>	Tidak ada survey atau riset di kawasan konservasi	Belum ada penelitian atau survey kawasan	0		
	Ada sedikit survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen). Data yang dihasilkan masih berupa cuplikan-cuplikan data dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	1		
	Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen). Ada database namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	2		
	Ada program survey dan riset yang komprehensif dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	Terdapat roadmap atau research need untuk kawasan (kebutuhan kebutuhan kawasan, kebutuhan penelitian tertuang dalam RP) – Ada database dan pemutakhiran data	3		
	a. Adanya kajian/riset daya dukung kawasan terkait pemanfaatan berkelanjutan	Cukup Jelas	+1		
Nilai Tambahan					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
11. Jumlah pegawai Apakah sudah ada cukup pegawai untuk mengelola kawasan konservasi Inputs	Tidak ada pegawai	♣ Pegawai yang dimaksud adalah yang bertugas di kawasan yang dinilai. ♣ Untuk UPT BKSDA adalah petugas resort	0		
	Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk kegiatan pengelolaan kritis (minimal)	Pegawai belum cukup, baik jumlah dan fungsi (Pengelolaan yang penting : tenaga administrasi dan teknis)	1		
	Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis (minimal)	Pegawai cukup secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) namun jumlahnya kurang	2		
	Jumlah pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Pegawai cukup secara fungsi dan jumlah	3		
	a. Terdapat dukungan tambahan dari program sukarelawan, masyarakat lokal dan lain-lain	Dukungan dari pihak lain di luar skema pendanaan APBN	+1		
Nilai Tambahan					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
12. Anggaran saat ini Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi? <i>Inputs</i>	Tidak ada anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	0		
	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas untuk mengelola	<i>Sudah jelas</i>	1		
	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	<i>Sudah jelas</i>	2		
	Anggaran yang tersedia mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	3		
Nilai Tambahan	a. Terdapat kepastian anggaran untuk pengelolaan KK Perairan multi-tahun	Adanya dokumen perencanaan anggaran	+2		
	b. Anggaran tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan Pemerintah namun juga dari kontribusi LSM, pajak, tarif masuk, CSR, dan lain-lain	Adanya dana lain diluar APBN	+1		
TOTAL NILAI UNTUK INPUT (C): 14 ATAU MENYESUAIKAN					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
D. Proses –Bagaimana pelaksanaan pengelolaan? Penilaian cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan					
13. Pendidikan dan penyadaran- tahuan Apakah ada perencanaan program pendidikan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan? <i>Proses</i>	Tidak ada program pendidikan dan penyadartahuan	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Ada program pendidikan dan penyadartahuan yang terbatas dan bersifat <i>ad hoc</i>	<i>Kegiatan tidak terprogram dan insidental</i>	1		
	Ada program pendidikan dan penyadartahuan tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	<i>Kegiatan terprogram namun dinilai kurang secara kuantitas</i>	2		
	Terdapat program pendidikan dan penyadartahuan yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan	<i>Terprogram dan dilaksanakan dengan cukup</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
14. Pemerintah dan swasta di sekitar Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar? Proses	Tidak ada / sangat sedikit proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) antara pengelola dan stakeholders	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Ada proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) antara pengelola dan stakeholders, akan tetapi belum terencana atau terjadwal.	<i>Sudah jelas</i>	1		
	Ada proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) yang terencana dengan stakeholder terkait, akan tetapi implementasinya masih terbatas	<i>Kerjasama pemanfaatan/penggunaan di kawasan</i>	2		
	Ada proses komunikasi (dalam konteks sinergitas kerjasama) yang terencana dan diimplementasikan untuk mendukung kawasan.	<i>Kerjasama antara pengelola dengan mitra disertai dengan forum penguat. Misal, terdapat forum pengelolaan seperti mitra Kuitai, dll</i>	3		
Nilai Tambahan	Terdapat komunikasi (dalam konteks studi dan berbagi pengalaman) dengan pengelola kawasan lainnya (misalnya: studi banding untuk pengelolaan kawasan)	<i>Berita acara dan/atau bukti lainnya</i>	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
15. Pelibatan dan partisipasi Parapihak Apakah stakeholder memberikan masukan yang berarti dalam pengambilan keputusan pengelolaan (non-masyarakat lokal)	Parapihak tidak memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan KK Perairan	Cukup jelas	0		
	Parapihak memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan namun tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan	<i>Berita acara dan/atau bukti lainnya</i>	1		
	Parapihak secara langsung berkontribusi pada beberapa pengambilan keputusan dalam pengelolaan	<i>Konsultasi publik, rapat koordinasi, dan/atau bukti lainnya</i>	2		
	Parapihak secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan	Konsultasi publik, rakor, dan/atau MoU dengan stakeholder	3		
Nilai Tambahan	Terdapat kontribusi pendanaan/ kesepakatan yang jelas antara KK Perairan dan operator wisata untuk jasa lingkungan yang memberikan manfaat di tingkat lokal.	<i>MoU dengan operator wisata</i>	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
16. Masyarakat lokal Apakah masyarakat lokal yang tinggal atau secara reguler menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam keputusan pengelolaan?	Masyarakat lokal tidak memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Masyarakat lokal memberikan beberapa masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengambilan keputusan tersebut.	<i>Masyarakat lokal terlibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan zonasi/blok</i>	1		
	Masyarakat adat secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevant terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka perlu ditingkatkan	<i>masyarakat lokal dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal zonasi/blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP/kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional..</i>	2		
	Masyarakat adat secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management	<i>sudah jelas</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
17. Staf terlatih Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan? <i>Inputs/Proses</i>	Pegawai kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi	<i>Tidak ada staf/petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan</i>	0		
	Pelatihan dan keahlian pegawai relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	Jumlah dan tingkat keahlian staf kurang dan belum sesuai dengan tujuan pengelolaan	1		
	Pelatihan dan keahlian pegawai memadai, tetapi dapat perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	<i>Jumlah dan tingkat keahlian staf memadai namun perlu ditingkatkan sesuai tujuan pengelolaan</i>	2		
	Pelatihan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Kawasan Konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	<i>Kecamatan staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan. identifikasi kupa-kupu</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
18. Perlengkapan Apakah perlengkapan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengelolaan? <i>Input</i>	Terdapat sedikit atau tidak ada perlengkapan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan	<i>Tidak ada perlengkapan</i>	0		
	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	<i>Terdapat perlengkapan namun masih sangat kurang untuk pengelolaan</i>	1		
	Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan	<i>Perlengkapan yang ada belum sepenuhnya memadai/ minimal untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan</i>	2		
	Perlengkapan dan fasilitas yang ada telah memadai	<i>Terdapat perlengkapan (perlengkapan lapangan, mobilisasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) yang memadai untuk mendukung pengelolaan – pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil (< 10 hektar), sarana digabung dengan kawasan lainnya</i>	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
19. Monitoring dan evaluasi Apakah kegiatan pengelolaan dimonitor terhadap kinerja? <i>Perencanaan/Proses</i>	Terdapat monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Terdapat kegiatan monitoring and evaluasi secara <i>ad hoc</i> , tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara regular	<i>Monev dilakukan secara insidental</i>	1		
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan	<i>Monev dilaksanakan secara regular</i>	2		
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	<i>Dilaksanakan secara regular dan adaptif, misal sistem monitoring & evaluasi melalui METT, SMART Patrol atau RBM</i>	3		
Nilai Tambahan	a. Kawasan berpartisipasi sebagai bagian program monitoring lingkungan nasional atau internasional seperti CARICOMP, CPACC, GCRMN, AGGRA atau lainnya (sertakan nama program)	Cukup jelas	+1		
	b. Terdapat kemampuan tanggap darurat di lokasi untuk mengurangi dampak dari selain ancaman	Tesedainya SOP tanggap darurat, keanggotaan staf dalam tim penanganan bencana, dll.	+1		
TOTAL NILAI UNTUK PROSES (DI): 25 ATAU MENYESUAIKAN					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
E. Outputs –Apa hasilnya? Penilaian pelaksanaan program pengelolaan dan aksi; penyediaan produk dan jasa					
Catatan : Output harus dinilai berdasarkan progres sejak penilaian terakhir. Jika ini merupakan penilaian pertama, responden harus menilai output selama 3 tahun terakhir. Untuk kawasan yang baru, responden dapat melewatkan bagian ini.					
20. Indikator Konteks Apakah indikator konteks telah diperbaiki	a. Status hukum telah meningkat (mengacu pada pertanyaan no.1 Status Hukum)	Mengacu kepada pertanyaan yang dimaksud. Nilai didapatkan jika terdapat peningkatan skor dibandingkan kajian METT sebelumnya. Catatan: Pertanyaan ini tidak aplikatif jika kondisi tidak berubah	+2		
	b. Peraturan telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.2 Peraturan KK Perairan)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	c. Penegakan Hukum telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.3 penegakan hukum)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	d. Batas kawasan telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.4 batas KK Perairan)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	e. KK Perairan telah terintegrasi dengan ICM (mengacu pada pertanyaan no.5 Integrasi KK Perairan)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	f. Inventarisasi sumberdaya telah ditingkatkan (mengacu pada pertanyaan no.6 Inventarisasi sumberdaya)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		
	g. Kesadaran dan kepedulian para pihak telah meningkat (mengacu pada pertanyaan no.7)	Sama dengan penjelasan sebelumnya	+2		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
21. Produk dan Pelayanan	a. Tanda – tanda batas tersedia atau yang terbaru telah terpasang	Cukup jelas	+1		
	b. Moorings – mooring tersedia atau yang terbaru telah terpasang	Cukup jelas	+2		
	c. Materi pendidikan – materi pendidikan tersedia atau telah dibuat yang baru	Cukup jelas	+1		
22. Mekanisme pelibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau kegiatan pengelolaan (misalnya dewan penasihat)	Tidak ada mekanisme untuk melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau aktivitas pengelolaan	Cukup jelas	0		
	Terdapat beberapa mekanisme melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau aktivitas pengelolaan namun tidak cukup	Ada mekanisme tetapi bersifat non-formal	1		
	Terdapat mekanisme yang memadai untuk melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan/atau aktivitas pengelolaan	Ada mekanisme dalam kerangka formal (contoh: adanya forum atau kelembagaan lain yang sifatnya memberikan masukan/ konsultatif)	2		
Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan partisipasi stakeholder?					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
23. Aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder (misal acara publik di KK Perairan) Apakah aktivitas pendidikan telah dikembangkan untuk stakeholder	Tidak tersedia aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder	Cukup jelas	0		
	Tersedia beberapa aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder namun tidak cukup	<i>Cukup Jelas – Disertai dokumentasi kegiatan</i>	1		
	Tersedia cukup aktivitas pendidikan lingkungan untuk stakeholder	<i>Cukup Jelas – Disertai dokumentasi kegiatan</i>	2		
24. Aktivitas pengelolaan Memiliki 2 aktivitas pengelolaan kritis yang telah ditingkatkan untuk menangani ancaman (yang telah dituliskan pada lembar data)	Aktivitas pengelolaan belum meningkat	Cukup jelas	0		
	Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan aktivitas pengelolaan	<i>Dokumentasi yg menunjukkan upaya penanganan untuk mengurangi 2 ancaman utama</i>	1		
	Aktivitas pengelolaan cukup meningkat	<i>Dokumentasi yg menunjukkan upaya penanganan untuk mengurangi 2 ancaman utama diatas, serta hasilnya</i>	2		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
25. Fasilitas pengunjung Apakah fasilitas pengunjung memadai?	Tidak ada fasilitas dan jasa bagi pengunjung walaupun telah diidentifikasi diperlukan	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	<i>Misal hanya ada papan informasi/papan petunjuk</i>	1		
	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung cukup memadai untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan	<i>Terdapat papan informasi, papan petunjuk, gerbang dan ruang informasi</i>	2		
	Fasilitas dan jasa bagi pengunjung sangat baik untuk tingkat kunjungan saat ini	<i>Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi, kenyamanan pengunjung)</i>	3		
26. Pungutan Jika pungutan (contoh: Biaya masuk atau denda) diterapkan apakah akan membantu pengelolaan kawasan konservasi?	Meskipun telah ada sistemnya, tetapi belum diterapkan (belum dilakukan pemungutan).	<i>PNBP tidak dipungut di wilayah yang sudah ditetapkan dalam PP No 12/2014</i>	0		
	Pungutan dikumpulkan, tetapi langsung ke pemerintah pusat dan tidak dikembalikan secara langsung pada kawasan konservasi atau lingkungan sekitarnya	<i>Pungutan hanya PNBP</i>	1		
	Pungutan dikumpulkan, tetapi didistribusikan kepada otoritas lokal, tidak kepada kawasan	<i>Ada mekanisme pungutan lain selain PNBP yang berkontribusi kepada kawasan/ lingkungan sekitarnya</i>	2		
	Luran dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial untuk kawasan konservasi dan lingkungan sekitarnya	<i>Belum ada mekanismenya di Indonesia</i>	3		
TOTAL NILAI UNTUK PROSES (E): 33ATAU MENYESUAIKAN					

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
F. Outcomes – Apa yang telah kita capai? Penilaian sejauh mana tujuan telah tercapai					
27. Pelatihan pegawai Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan?	Pegawai sudah mendapatkan pelatihan, tetapi dapat ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	Staf pengelola kawasan (contoh: Polhut, PEH) secara otomatis telah mendapatkan pelatihan dasar	2		
	Pelatihan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, dan antisipasi kebutuhan kedepan	Dibuktikan dengan dokumentasi atau berita acara kegiatan pelatihan yang relevan dengan pertanyaan	3		
	<i>Inputs/Proses</i>				
28. Apakah pengelolaan telah sesuai dengan tujuan kawasan	Pengelolaan belum sesuai dengan tujuan kawasan	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP	0		
	Pengelolaan sebagian kecil sudah sesuai dengan tujuan kawasan	Sama dengan penjelasan sebelumnya	1		
	Pengelolaan sebagian besar sudah sesuai dengan tujuan kawasan	Sama dengan penjelasan sebelumnya	2		
	Pengelolaan sudah sesuai dengan tujuan kawasan	Sama dengan penjelasan sebelumnya	3		
29. Gangguan – Apakah ancaman telah berkurang?	Gangguan meningkat	Data laporan patrol atau data gangguan lainnya	0		
	Gangguan berada pada sekitaran level yang sama	Sama dengan penjelasan sebelumnya	1		
	Gangguan telah sedikit berkurang	Sama dengan penjelasan sebelumnya	2		
	Gangguan sebagian besar telah berkurang	Sama dengan penjelasan sebelumnya	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
30. Kondisi sumberdaya – Apakah kondisi sumber daya membalk?	Kondisi sumberdaya alam menurun	Laporan survei monitoring	0		
	Kondisi sumberdaya alam berada pada kisaran level yang sama	Laporan survei monitoring	1		
	Kondisi sumberdaya alam sedikit meningkat	Laporan survei monitoring	2		
	Kondisi sumberdaya alam meningkat secara signifikan	Laporan survei monitoring	3		
31. Kesejahteraan masyarakat Apakah kesejahteraan masyarakat meningkat? (beri beberapa contoh) Indikator: ❖ <i>Dampak kawasan secara keseluruhan terhadap peningkatan pendapatan/ ekonomi dan standar hidup masyarakat</i>	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat menurun	Hasil kajian, survei, analisis data	0		
	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat berada pada kisaran level yang sama	Hasil kajian, survei, analisis data	1		
	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat sedikit meningkat	Hasil kajian, survei, analisis data	2		
	Mata pencaharian dan standar hidup masyarakat meningkat secara signifikan	Hasil kajian, survei, analisis data	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah ke depan
Nilai Tambahan	a. Pengelolaan KK Perairan sesuai dengan budaya lokal termasuk praktek tradisional, hubungan, sistem sosial, fitur budaya, situs bersejarah dan monumen terkait dengan sumber daya perairan dan penggunaannya	Dokumen rencana pengelolaan	+1		
	b. Konflik penggunaan sumberdaya telah menurun	Laporan terkait konflik dan penanganannya	+1		
	c. Semua pihak merasakan manfaat keberadaan kawasan	Pengamanan kawasan swakarsa, atau bentuk-bentuk lain partisipasi aktif masyarakat; <i>Catatan: bukti masyarakat telah merasakan manfaat dari keberadaan kawasan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan kawasan</i>	+1		
	d. Manfaat non-finansial dari sumberdaya perairan kepada masyarakat telah dipertahankan atau ditingkatkan	Ada hasil survei/kajian	+1		
32. Kesadaran lingkungan Apakah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat?	Kesadaran lingkungan dari kondisi sumberdaya, gangguan dan kegiatan pengelolaan telah menurun	Ada hasil survei/kajian/analisis	0		
	Kesadaran lingkungan berada pada kisaran level yang sama	Ada hasil survei/kajian/analisis	1		
	Kesadaran lingkungan sedikit meningkat	Ada hasil survei/kajian/analisis	2		
	Kesadaran lingkungan telah meningkat secara signifikan	Ada hasil survei/kajian/analisis	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah kedepan
33. Kepatuhan Apakah pengguna mematuhi peraturan di dalam kawasan	Kurang dari 25% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	0	-	
	25% - 50% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	1		
	50% - 75% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	2		
	Lebih dari 75% pengguna mematuhi peraturan	Ada hasil survei/kajian/analisis	3		
34. Kepuasan stakeholder – Apakah stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Kurang dari 25% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	0		
	25% - 50% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	1		
	50% - 75% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	2		
	Lebih dari 75% stakeholder puas dengan proses dan output dari KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	3		
Nilai Tambahan	a. Stakeholder merasa bahwa mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam keputusan manajemen	Ada hasil survei/kajian/analisis	+1	-	
	b. Stakeholder merasa bahwa mereka cukup mewakili dalam proses pengambilan keputusan KK Perairan	Ada hasil survei/kajian/analisis	+1		
TOTAL NILAI UNTUK OUTCOME 27 ATAU ATAU MENYESUAIKAN					

Lampiran 5. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan

1. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan (*terrestrial*)

Pada lembar penilaian terdapat 30 pertanyaan pada penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daratan sehingga potensi nilai maksimal adalah 90 poin. Kemudian pada beberapa pertanyaan yaitu nomor 7, 21, 24 dan 30 terdapat nilai tambahan yang masing-masing memungkinkan untuk penambahan 3 poin dari setiap nomor tersebut. Nilai tambahan ini apabila diisi akan menambah poin dan disertakan dalam bilangan pembagi untuk menghitung persentase nilai akhir, namun bila tidak diisi, nilai tambahan tidak disertakan dalam penghitungan nilai akhir.

Pada kawasan tertentu, terutama kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka margasatwa, tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan wisata alam. Dengan demikian, pertanyaan yang menyangkut wisata alam tidak disertakan dalam penilaian. Sebagai contoh adalah Cagar Alam Cyclops di Papua yang secara keseluruhan mendapat 60 poin namun tidak menyertakan pertanyaan nomor 25, 27 dan 28 sehingga total nilai yang mungkin dicapai adalah 81.

Kemudian pada nilai tambahan 7, 21, 24 dan 30 terdapat tambahan 4 nilai, maka penghitungan nilai akhirnya adalah sebagai berikut :

❖ Cagar Alam Cyclops

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Maksimum Skor}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{60}{85} \times 100\% = 70\%$$

- *) Maksimum skor adalah 85 karena terdapat 3 pertanyaan (25, 27 dan 28) yang tidak dijawab karena secara peraturan perundangan tidak dapat diaplikasikan pada kawasan suaka alam, serta nilai tambahan 4.

Akan tetapi pada kawasan Taman Wisata Alam ataupun Taman Nasional yang memungkinkan adanya keuntungan ekonomis oleh masyarakat dari kawasan dan kegiatan wisata alam, maka pertanyaan nomor 25, 27 dan 28 dapat dijawab sehingga nilai maksimum adalah 90. Dengan nilai tambahan dimisalkan 4 poin maka, penghitungannya adalah sebagai berikut :

❖ Taman Wisata Alam Pulau Weh

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{60}{94} \times 100\% = 64\%$$

2. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Penilaian mencakup 6 (enam) elemen evaluasi, jika ada pertanyaan yang tidak diisi (karena mungkin tidak relevan), maka nilai maksimum berubah sesuai dengan jumlah pertanyaan (nilai) pertanyaan yang dinilai saja, nilai akhir berupa persentase dari nilai yang didapat terhadap nilai maksimum yang disesuaikan.

RANGKUMAN NILAI			
NILAI YANG DIPEROLEH	KEMUNGKINAN NILAI TOTAL	KEMUNGKINAN NILAI TOTAL YANG DISESUAIKAN	PERSENTASE
Nilai Total Konteks (A):	26		
Nilai Total Perencanaan (B):	14		
Nilai Total Input (C):	14		
Nilai Total Proses (D):	25		
Nilai Total Output (E):	33		
Nilai Total Outcome (F):	27		
Total:	139		100%

Berbeda dengan penilaian kawasan konservasi daratan *terrestrial*, pada penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan perairan, nilai maksimum yang bisa diperoleh kawasan konservasi adalah 139. Dengan demikian untuk mendapatkan nilai akhir maka nilai pembagiya adalah 139. Berikut contohnya.

❖ Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{100}{139} \times 100\% = 71\%$$

Keseluruhan konsep skoring memiliki kesulitan dan kemungkinan untuk melenceng. Sistem saat ini mengasumsikan bahwa seluruh pertanyaan telah melingkupi semua isu secara sama. Karenanya, skor akan memberikan penilaian yang lebih baik jika dikalkulasikan sebagai persentase dari tiap enam elemen Kerangka Kerja WCPA (misal: konteks, planning, inputs, process, outputs dan assessments)

Lampiran 6. Tabel Perhitungan Persentase Setiap Aspek Penilaian

Aspek	No.	Pertanyaan	Nilai	Prosentase Setiap Aspek (%)
Context Planning	1	Status hukum		
	2	Peraturan Kawasan		
	4	Tujuan Kawasan		
	5	Desain Kawasan		
	7	Rencana Pengelolaan		$\frac{\text{Nilai Total per Aspek}}{\text{Maksimum Nilai Per Aspek}} \times 100\%$
Input	21	Perencanaan Penggunaan lahan dan air		
	3	Penegakan Hukum		
	9	Inventarisasi Sumberdaya		
	13	Jumlah Pegawai		
	15	Anggaran		
	16	Kepastian anggaran		
	18	Perlengkapan		
Process	6	Pengukuhan		
	10	Sistem Perlindungan		
	11	Riset		
	12	Pengelolaan Sumberdaya		
	14	Pelatihan Pegawai		
	17	Pengelolaan Anggaran		
	19	Pemeliharaan Perlengkapan		

Aspek	No.	Pertanyaan	Nilai	Prosentase Setiap Aspek (%)
	20	Pendidikan dan penyadaran		
	22	Pemerintah dan swasta disekitar		
	23	Masyarakat adat		
	24	Masyarakat Lokal		
	26	Monitoring dan evaluasi		
	28	Operator wisata komersil		
	29	Pungutan		
	8	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek		
Output	27	Fasilitas pengunjung		
Outcome	25	Keuntungan ekonomis		
	30	Kondisi nilai-nilai		

Lampiran 7. Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

(Nama Kawasan)

Nilai		
Skor METT		$\frac{A}{B} \times 100\%$ %
Penjelasan Nilai		
Konteks	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Perencanaan	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Input	Kekuatan	
%	kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Proses	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Output	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	
Outcome	Kekuatan	
%	Kelemahan	
	Isu prioritas	
	rekomendasi	

Penilai	Fasilitator
Nama Penilai	Nama Fasilitator



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Gedung Manggala Wanabhakti Blok 1 Lt.8
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. (021)5730301, Fax. (021)5733437